

DAFTAR ISI

Gerakan Sosial (Baru) Pasca "Orde Baru"

1. PKBI: Aktor *Intermediary* dan Gerakan Sosial Baru
Haryanto, Siti Mauliana Hairini, Abu Bakar 187-199
2. Gerakan Buruh Pasca Soeharto:
Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel
Muhtar Habibi 200-216
3. Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan:
Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat
(Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung)
Oki Hajiansyah Wahab 217-233
4. Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia
Emilianus Yakob Sese Tolo 234-249
5. Optimising Community-Based Forest Management Policy In
Indonesia:
A Critical Review
Lucas Rumboko, Digby Race, Allan Curtis 250-272
6. Berlindung dalam Hak Asasi Manusia:
Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan
Prostitusi
Rima Nusantriani Banurea 273-292

Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel

Muhtar Habibi •

Abstract

Labor movement after Soeharto shows different trend compare to the many view of the observers before. In the midst of the crush of neoliberal labor market flexibility, workers still often performs various street protests. The rising of minimum wage and changes in employment status towards more profitable one, are some workers material benefits gained through their street protest. Moreover, street protest also contributes to the making of collective workers identity. The high intensity of the street actions spawned the backlash from the capital and state. However, this attack rather than weaken the labor movement, instead it has the potential to encourage greater unity needs of the workers. The backlash from the capital and state during growing economic circumstances provide momentum to the emerging needs of modern interest organizations: a labor' party. The future of the establishment labor' party will depend on how much effort of the progressive elements in trade union able to leverage on the one hand a growing economy condition, and at the same time politically able to use reprisals of state and capital against their movement to create the need for the formation of an independent labor party for the rank and file workers.

Keywords:

labor market flexibility; workers street-level politics; labor party

Abstrak

Gerakan buruh pasca Soeharto menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan dengan banyak pandangan pengamat sebelumnya. Di tengah himpitan fleksibilitas pasar tenaga kerja neoliberal, pekerja masih sering melakukan aksi protes di jalanan. Kenaikan upah minimum dan perubahan status kepegawaian selalu menjadi tuntutan utama. Selain itu, aksi protes di jalanan juga berkontribusi terhadap pembuatan identitas pekerja kolektif. Tingginya intensitas aksi protes di jalanan melahirkan reaksi dari pemerintah. Namun, serangan ini bukan melemahkan gerakan buruh, melainkan memiliki potensi untuk mendorong kesatuan yang lebih besar dari para pekerja. Reaksi dari pemerintah selama keadaan ekonomi berkembang memberikan momentum untuk kebutuhan dari organisasi modern: partai buruh. Masa depan pembentukan partai buruh akan tergantung pada berapa banyak usaha. Unsur-unsur progresif dalam serikat pekerja dapat memanfaatkan kondisi pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama secara politis dapat menggunakan pembalasan dari negara dan modal terhadap gerakan mereka untuk menciptakan kebutuhan untuk pembentukan partai buruh yang independen untuk kelas pekerja.

Kata Kunci:

fleksibilitas pasar tenaga kerja; politik tingkat pekerja; partai buruh

-
- Peneliti Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Institute of Social Studies, Den Haag
e-mail: habibi.muhtar@gmail.com

Pendahuluan

Gerakan buruh pasca Soeharto memang telah menyita banyak perhatian masyarakat, termasuk para pengamat. Jika diamati lebih dekat, sebagian besar pemerhati buruh sebenarnya memiliki gambaran suram terhadap gerakan buruh Indonesia. Pertama, sebagian pengamat berargumen bahwa pasca Soeharto, buruh bukanlah kelompok yang solid. Sebagai warisan dari otoritarianisme brutal Soeharto, buruh dilihat terlalu terpecah-pecah dan tidak bisa mendesak kepentingannya sebagai kelompok (Hadiz, 1998; 2002, Tornquist, 2004). Buruh tidak memiliki rasa kebersamaan sebagai kelompok dan buruh seringkali justru lebih memperhatikan gaya hidup konsumtifnya sendiri (Warrouw, 2005). Kedua, organisasi buruh dianggap tetap lemah meskipun telah lahir peraturan yang menyediakan payung bagi lahirnya berbagai serikat buruh. Bukannya membantu lahirnya organisasi buruh yang independen, peraturan seperti itu justru dianggap sebagai pemecah belah gerakan buruh (Caraway, 2006). Kecenderungan ketiga dalam studi perburuhan sebelumnya adalah dengan menunjukkan kegagalan kelompok buruh dalam pertarungan pemilu (Ford, 2005). Bagi kelompok pengamat ini, buruh dianggap gagal menancapkan pengaruh politiknya pasca Soeharto.

Berbeda dengan pandangan pengamat sebelumnya, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa di tengah himpitan pasar kerja fleksibel, kaum buruh masih tetap gencar melakukan perlawanan melalui aksi-aksi jalanan yang mereka gelar. Menguasai jalan-jalan raya, menduduki kantor-kantor publik, menutup jalan tol, memblokade kawasan industri, merupakan berbagai aksi jalanan yang kian banyak dilakukan buruh. Aksi jalanan nampaknya mulai dipilih buruh sebagai reaksi mereka atas kekebalan penguasa yang dirasa makin abai terhadap nasib buruh. Kombinasi

antara kesempatan yang diberikan demokrasi (prosedural) dan tekanan ekonomi akibat penerapan sistem kerja kontrak dan *outsourcing*, mendorong buruh untuk turun ke jalanan dan unjuk kekuatan (Juliawan, 2010b: 220-224)¹. Perpecahan di kalangan buruh memang tidak bisa dinafikan. Tapi itu baru separuh cerita. Aspek lain yang kurang mendapat perhatian ialah di tengah perpecahan itu, kaum buruh masih menyediakan ruang untuk bekerjasama dalam aksi-aksi jalanan bersama (Juliawan, 2009).

Tidak hanya berkontribusi pada sisi material sebagaimana telah ditunjukkan Juliawan (2011), aksi jalanan buruh juga berkontribusi pada pembentukan identitas mereka sebagai buruh (Saptari, 2008). Secara lebih spesifik, aksi-aksi jalanan buruh di Bekasi telah turut mendorong lahirnya benih-benih pembentukan kelas buruh (Habibi, 2013). Tulisan ini akan diawali dengan uraian tentang konteks pasar kerja fleksibel yang menjadi panggung gerakan buruh pasca Soeharto. Bagian selanjutnya menggambarkan aksi jalanan buruh pasca Soeharto dan signifikansinya bagi buruh. Masa depan aksi jalanan buruh dalam melawan pasar kerja fleksibel akan dijelaskan pada bagian terakhir.

¹ Demokratisasi telah memberi ruang bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat, termasuk buruh, untuk turut mempengaruhi kebijakan yang menentukan hajat hidup orang banyak. Dari demokratisasi juga, aksi demonstrasi dilegalkan sebagai cara yang sah dalam menyuarakan kepentingan. Aksi demonstrasi-jalanan tidak mengalami kriminalisasi. Diadopsinya sistem kerja kontrak dan *outsourcing* telah mengancam langsung kehidupan buruh secara umum. Ini bukan lagi persoalan buruh per individu. Buruh mulai sadar ketika kawannya kehilangan pekerjaan, tinggal tunggu giliran saja dirinya juga bakal bernasib sama. Ujungnya, ketidakpastian pekerjaan dan penghidupan. Dalam kondisi ini, buruh seakan tidak punya pilihan lain kecuali melawan. Lebih jauh lihat Juliawan (2010b: 220-224).

Kelenturan Pasar Kerja Fleksibel

Buruh pasca Soeharto pada dasarnya diatur melalui rezim neoliberal. Karakter rezim ini dapat dilihat dalam gagasan tentang *Labor Market Flexibility* (LMF). Gagasan dari LMF adalah pekerja bebas untuk mengalokasikan jasanya untuk merespon pergantian kesempatan pergantian upah relatif, sementara perusahaan bebas untuk menyesuaikan pekerja dalam respon untuk pergantian kesempatan keuntungan relatif. Di dalam pasar tenaga kerja, interaksi yang bebas di antara pengguna tenaga kerja (*employer*) dengan tenaga kerja (*employee*) dipandang sebagai kondisi yang perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Pengguna tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan tenaga kerja bebas memilih pengguna tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan rasional tenaga kerja (Purdy, 1988: 5-6). Kebutuhan rasional pengguna ditentukan oleh jenis dan kapasitas produksi yang dibutuhkan sesuai dengan persaingan yang dihadapinya dalam pasar komoditas. Kebutuhan rasional tenaga kerja ditentukan oleh seberapa jauh pendapatan yang diberikan oleh pengguna tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerangka seperti ini, perundingan kolektif oleh serikat buruh, pelaksanaan secara ketat aturan rekrutmen dan pemecatan pekerja, pesangon, upah minimum dan seterusnya dianggap sebagai suatu distorsi harga karena dianggap membatasi kebebasan antara pemberi kerja dan pekerja (Islam, 2000: 3-4). Jika negara terlalu banyak campur tangan dalam pasar kerja, maka pasar kerja disebut terlalu 'kaku' berlawanan dengan pasar kerja 'fleksibel' yang minim peran negara dan menyerahkan mekanisme pasar sebagai penggerak utama kondisi kerja.

Pasar kerja fleksibel paling tidak memiliki empat dimensi (Juliawan, 2010a:

28-29; Atkinson, 1984). *Pertama*, fleksibilitas eksternal (*External Numerical Flexibility*) yang berarti penyesuaian penerimaan buruh dari pasar kerja eksternal. Fleksibilitas dicapai dengan mempekerjakan buruh dengan kontrak tetap maupun kontrak sementara atau melalui peraturan pengupahan dan pemberhentian yang longgar. *Kedua*, fleksibilitas internal (*Internal Numerical Flexibility*) atau biasa disebut fleksibilitas dalam waktu kerja (*working time flexibility*). Bentuk fleksibilitas dilakukan dengan menyesuaikan jam atau jadwal pekerjaan bagi buruh yang bekerja di perusahaan. Termasuk dalam fleksibilitas ini adalah *part-time*, fleksibilitas jam kerja (termasuk kerja bagian malam atau akhir pekan), perhitungan waktu kerja berdasarkan jam lama kerja, waktu meninggalkan pekerjaan dan berbagai penyesuaian waktu yang lain. *Ketiga*, fleksibilitas fungsional (*Functional Flexibility*) dimana terdapat kelenturan dalam mempekerjakan buruh di berbagai bidang pekerjaan yang berbeda di dalam perusahaan. Pekerjaan dilakukan oleh operator atau manajemen dan buruh yang terlatih. Fleksibilitas jenis ini juga dapat diraih melalui cara *outsourcing*. *Keempat*, fleksibilitas upah (*Financial or Wage Flexibility*). Dalam hal ini, upah tidak ditentukan secara kolektif antara pengusaha dan buruh. Namun upah dari pekerjaan merupakan refleksi atau hasil pertemuan sisi permintaan (*demand*) dan sisi penawaran (*supply*) tenaga kerja.

Paling tidak ada dua aspek hubungan industrial pasca Soeharto yang mencerminkan karakter ini. *Pertama*, pengaturan serikat buruh menganut *multy union system*. Melalui UU No.21/2000 tentang serikat buruh/pekerja, sekurang-kurangnya sepuluh orang buruh dapat membentuk serikat buruh di suatu perusahaan. Meskipun sedikit menyimpang dari konvensi inti ILO No.87 namun UU ini

dianggap mendorong berjalannya demokratisasi di tempat kerja melalui serikat pekerja/serikat buruh, buruh diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerjanya (Uwiyono, 2006).

Pengaturan ini bertolak belakang dari jaman kekuasaan Soeharto. Pada masa Orde Baru, buruh dikondisikan dalam suatu hubungan “korporatisme eksklusiver negara”² dimana kebebasan berserikat direpresi secara brutal oleh Soeharto (Hadiz, 1996: 1). Represi terhadap buruh dapat dilihat dari berbagai peraturan menteri yang menakutkan sejumlah undang-undang (Katjasungkana, 1996: 31). UU No. 21 Tahun 1954 yang menjamin kebebasan berserikat buruh ditakhlukkan oleh KepMen 1/1975 dan Permen 1108/1986. UU No.22 Tahun 1957 yang menjamin hak mogok ditakhlukkan oleh Kepmen 342/1986 yang membolehkan pengusaha memberi sanksi kepada buruh mogok dan tanpa membayar upah. Bahkan Kepmen yang dikeluarkan pada masa Mennaker Sudomo itu dengan jelas mengatakan bahwa “aparap keamanan” (Korem, Kodim, dan Kores) boleh ikut campur dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, terutama bila mengarah pada aksi mogok, dan petugas Depnaker perlu berkoordinasi dengan Pemda, Polres dan Kodim ketika menanggulangi tindakan fisik dalam pemogokan (Rudiono, 1992: 80).

Aspek kedua dalam hubungan industrial yang mencerminkan karakter neoliberal ialah pengaturan hubungan kerja. Melalui UU 13/2003, hubungan perburuhan telah menjadi lebih fleksibel. *Pertama*,

diberlakukannya sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dengan PKWT, perusahaan dapat mempekerjakan buruh kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan jenis tertentu dalam waktu tertentu. Dampaknya adalah banyak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja tetap untuk kemudian direkrut kembali dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak). Dalam mekanisme ini, buruh kontrak tidak memperoleh hak-hak sebagaimana buruh tetap sehingga meringankan beban pengusaha (Uwiyono, 2006). Dengan buruh kontrak, pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar buruh tetap. *Kedua*, diberlakukannya sistem *outsourcing*. Dalam hal ini perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.³ Implikasi dari penerapan *outsourcing* adalah banyak perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan buruhnya untuk selanjutnya direkrut kembali melalui perusahaan jasa pekerja (*outsourcing* pekerja). Pengusaha dengan tujuan efisiensi merasa aman jika buruh yang bekerja pada mereka adalah buruhnya perusahaan jasa pekerja. Dengan mekanisme ini, yang bertanggung jawab terhadap buruh *outsourcer* tadi adalah perusahaan jasa pekerja.

Sama halnya dengan aspek serikat pekerja, pengaturan hubungan kerja pasca 1998 merupakan perubahan drastis dari masa Soeharto. Masa Orde Baru ditandai oleh pengaturan hubungan kerja yang kaku. Kekakuan ini mengacu pada tidak dikenalnya status pekerja kontrak (tidak tetap) dan *outsourcing* dalam peraturan legal. Baru pada tahun 1997, masa kritis kekuasaan Soeharto, gagasan tentang sistem kontrak diperkenalkan. Beruntung

² “Korporatisme Eksklusiver” diperkenalkan oleh Alfred Stepan untuk menjelaskan upaya kelompok elite dalam masyarakat untuk meredam dan mengubah bentuk “kelompok-kelompok kelas pekerja yang menonjol” melalui kebijakan yang bersifat koersi. Ia berbeda dengan “korporatisme inklusiver” yang lebih bercirikan akomodasi dan inkorporasi kelompok-kelompok tersebut oleh negara.

³ Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003

bagi buruh, UU 25/1997 itu dibekukan hingga turunnya Soeharto karena mendapat tantangan luas dari kelompok masyarakat sipil (Tjandraningsih & Herawati, 2008). Perbandingan karakter kebijakan perburuhan masa Orde Baru dan Reformasi dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.
Perbandingan Karakter Kebijakan Perburuhan Orde Baru dan Reformasi

Aspek Era Kekuasaan	Hubungan Kerja	Serikat Buruh
Orde Baru	Kaku: tidak mengenal sistem kerja kontrak dan outsourcing	Kebebasan berserikat dibatasi, mengadopsi <i>single-union system</i>
Pasca Reformasi	Fleksibel: penerapan aturan sistem kerja kontrak dan outsourcing	Kebebasan berserikat dijamin, mengadopsi <i>multy-union system</i>

Sumber: Diolah dari berbagai data sekunder

Pengadopsian fleksibilitas hubungan kerja melalui praktik *outsourcing* dan sistem kontrak telah mengantarkan kaum buruh pada lautan pasar tenaga kerja bebas yang berbasis pada hukum besi penawaran dan permintaan. Hanya buruh tetap yang masih memperoleh hak normatif, itupun belum tentu dipenuhi. Sebaliknya, buruh berstatus kontrak tidak berhak memperoleh perlindungan normatif. Bagaimana dampak pengaturan neoliberal bagi buruh? Selain kesejahteraan yang secara langsung terancam⁴, buruh juga mengalami pelemahan gerakan. Pemberlakuan sistem kontrak dan *outsourcing*, telah secara halus menekan buruh yang memiliki status itu untuk berpikir ulang sebelum bergabung dalam serikat pekerja maupun terlibat dalam aksi-aksi perjuangan solidaritas buruh

lainnya (Tjandraningsih, Herawati dan Suhadmadi, 2010b: 46). Pekerja yang dipekerjakan dengan sistem fleksibel, tidak memiliki rasa kesatuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-haknya secara berkesinambungan, mengingat jangka waktu kerjanya yang singkat. Ketidakpastian akan pekerjaan di masa depan menjadi senjata ampuh melumpuhkan militansi buruh.

Dalam aspek lain, praktik *outsourcing* dan sistem kontrak juga telah menurunkan arti penting kebebasan berserikat buruh yang diberikan pasca Soeharto runtuh (Juliawan, 2010a). Munculnya perusahaan-perusahaan penyalur buruh (yayasan *outsourcing*) sebagai akibat UU No.13/2003, telah mengambil keuntungan signifikan dari menjual tenaga buruh. Sebagai perantara, yayasan telah mengambil tenaga dari pemiliknya sendiri (buruh) karena keuntungan terbesar bukan diperoleh buruh bersangkutan, melainkan para pemilik yayasan *outsourcing* dan makelar buruh lainnya (Juliawan, 2010a: 26). Dengan studi kasus di Tangerang, Juliawan (2010a) memperlihatkan betapa sebagian besar buruh direkrut melalui agen-agen informal seperti “orang kuat lokal”, jagoan, preman atau *Jawara* dalam kasus spesifik Tangerang. Mereka ini jika tidak pemilik yayasan, maka paling tidak mereka bekerjasama dengan yayasan *outsourcing*.

Praktik yang dijalankan yayasan telah menguntungkan pihak perusahaan. Biaya produksi perusahaan dapat turun karena biaya perekrutan buruh dapat dilakukan pihak yayasan. Perusahaan juga tidak perlu khawatir dengan buruh yang “rewel” dengan kondisi kerja, karena mereka dapat dikembalikan ke yayasan. Biaya sosial perusahaan juga dapat ditekan. Pihak

⁴ Hasil penelitian Tjandraningsih, Herawati dan Suhadmadi, (2010a: v) menyatakan: “Mayoritas pekerja *outsourcing* menerima upah dibawah nilai upah minimum dan adanya pemotongan upah oleh agen *outsourcing*; tidak ada pesangon dan jaminan

pensiun, tidak ada jaminan kesehatan yang memadai, mudah di PHK tanpa melalui proses peradilan perburuhan, dan usia produktif yang hilang karena pekerja *outsourcing* pada umumnya disyaratkan berusia dibawah 25 tahun”.

yayasan melalui orang lokal kuat yang memiliki relasi patron-klien kuat, dapat mengontrol buruh yang dia rekrut untuk tidak menuntut kondisi lingkungan kerja yang memadai. Hal yang lebih parah bagi buruh, persaingan antar yayasan telah membuat buruh benar-benar seperti komoditas barang lain. Persaingan antar yayasan dengan menawarkan paket tertentu agar buruh mau disalurkan, menjadi kian umum. Penawaran uang muka lebih rendah, pelatihan, hingga bonus menjadi cara yayasan bersaing dengan yayasan lain (Juliawan, 2010a: 39-40). Tapi ujungnya tetap sama: buruh menjadi komoditas yang dijual murah. Kebebasan berserikat nampak kurang berarti bagi buruh ketika praktik *outsourcing* dan sistem kontrak telah mengikat mereka dalam sebuah relasi patron-klien dengan perekrutnya. Buruh tidak benar-benar bebas untuk berserikat.

Perlawanan Buruh: Aksi Jalanan

Buruh memang tidak sama sekali diam ketika dihimpit oleh mekanisme pasar kerja fleksibel ala neoliberal. Bahkan sebelum pengadopsian aturan *outsourcing* dan kontrak dilakukan (UU No.13/2003), buruh telah menunjukkan perlawanan merayakan kejatuhan kekuasaan Soeharto. Aksi ribuan buruh pada Mei dan Juni 2001 di berbagai daerah yang menuntut pemberlakuan kembali KepMen Tenaga Kerja No 150/2000 menjadi salah satu tonggak aksi jalanan buruh. Aksi ribuan buruh di bulan April dan Mei 2006 dalam demo besar-besaran menolak revisi UU No/13/2003 juga kembali menandakan kehadiran aksi buruh. Secara periodik, kita juga melihat aksi protes buruh yang secara rutin terjadi di berbagai daerah menuntut kenaikan upah minimum tiap tahunnya. Belum lagi, jika melihat kecenderungan aksi jalanan buruh tiap tahun ketika merayakan *May Day*. Aksi jalanan seakan memang menjadi ikon

gerakan buruh pasca ambruknya otoritarianisme Soeharto (Juliawan, 2011).

Geliat aksi jalanan buruh makin menunjukkan peningkatan signifikan sejak persiapan pembentukan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di tahun 2009 hingga deklarasinya pada April 2010. Bukan kebetulan, aliansi berbagai serikat buruh dan organisasi masyarakat ini memilih menggunakan nama 'Komite Aksi'. Mereka percaya bahwa perjuangan membuat perubahan tidak akan terwujud tanpa sebuah aksi nyata berupa tekanan terhadap negara. Puluhan aksi yang melibatkan ribuan buruh telah dilakukan sejak pertengahan 2010 hingga akhirnya UU BPJS disahkan pada 28 Oktober 2011 (SPAI-FSPMI, 2012). Tidak hanya terjadi di Jakarta, aksi KAJS juga menjamur ke berbagai kota di Indonesia. Pada tahun 2010 juga, aksi tutup kawasan industri pertama di Indonesia pasca Soeharto, terjadi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung Jakarta (Antara, 25/11/2010).

Puncak aksi jalanan buruh terjadi pada tahun 2012. Pada tanggal 10 dan 27 Januari, aksi tutup tol terjadi di Serang dan Bekasi melibatkan puluhan ribu buruh yang menuntut kenaikan upah (Kabar Serang, 11/1/2012; Kompas, 27/1/2012). Militansi buruh kembali terlihat ketika mereka menjadi tulang punggung gerakan perlawanan kenaikan harga BBM pada Maret – April. Gerakan buruh benar-benar unjuk kekuatan pada bulan yang dianggap miliknya: Mei. Tepat pada *May Day*, delapan puluh ribuan buruh yang beratribut berbagai serikat buruh memenuhi jalanan Ibukota hingga masuk Stadion Gelora Bung Karno (Berita Satu, 1/5/2012). Di hari itu juga, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dideklarasikan, menandai bersatunya tiga konfederasi terbesar yang beranggotakan sekitar 2 juta buruh. Aksi jalanan buruh paling spektakuler mungkin adalah gerakan yang populer disebut

'grebek pabrik' atau solidaritas antar pabrik yang terjadi di Bekasi pada rentang Mei hingga November (Mufakhir, 2012). Belum lagi aksi mogok nasional tanggal 3 Oktober 2012 yang disebut sebagai mogok terbesar di Indonesia setelah masa Soekarno. Melibatkan 80 kawasan industri dengan 754 perusahaan di 12 provinsi dan 37 kabupaten/kota (Gatra, 3/10/2012) dan 2,4 juta buruh mogok telah melumpuhkan aktivitas produksi di kawasan-kawasan industri. Kronologi tonggak-tonggak aksi jalanan buruh pada tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Aksi jalanan buruh pada beberapa tahun terakhir telah turut menentukan proses kenaikan upah minimum di beberapa kota dan propinsi. Di Jawa Timur, rata-rata kenaikan UMK tahun 2013 mencapai 22,14 persen atau jauh di atas angka inflasi (Disnakertrans Jawa Timur, 24/11/2012). Sementara di Jawa Barat, rata-rata kenaikan UMK mencapai 20 persen. UMK Kota Bogor bahkan naik hingga 42 persen (Radar Bogor, 15/11/2012). Di kota Tangerang, UMK naik 50 persen (Tempo, 21/11/2012). Sementara di Ibukota Jakarta, kenaikan UMP mencapai 30 persen (Antara, 27/11/2012).

Tabel 2.
Kronologi Aksi Jalanan Buruh Tahun 2012

Waktu	Bentuk Aksi Jalanan	Pelaku	Tuntutan
Januari 2012	Penutupan jalan tol di Serang Banten dan Bekasi Jawa Barat	Puluhan ribu buruh di kawasan industri Serang dan Bekasi	Kenaikan Upah Minimum
Maret – April 2012	<i>Long march</i> di jalanan Jakarta	Gabungan Buruh di area Jabodetabek	Menolak Kenaikan Harga BBM
Mei 2012	<i>Long march</i> di jalanan Jakarta	Gabungan ratusan ribu buruh di area Jabodetabek	Memperingati <i>May Day</i> dan mendeklarasikan berdirinya MPBI yang beranggotakan sekitar 2 juta buruh
Mei – November 2012	Aksi solidaritas antar pabrik atau "grebek pabrik" di Bekasi	Puluhan ribu buruh di area Bekasi	Menghapus status kerja kontrak dan <i>outsourcing</i> (tenaga alih daya)
Oktober 2012	Mogok Kerja Nasional dan turun ke jalan	Melibatkan buruh di 80 kawasan industri dengan 754 perusahaan di 12 provinsi dan 37 kabupaten/kota	Penghapusan <i>outsourcing</i> , menolak upah murah, dan segera merealisasikan Jaminan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mulai 1 Januari 2014.

Diolah dari berbagai data sekunder

Secara umum di tingkat nasional, kenaikan UMP adalah 18,32 persen. Kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya sebesar 10,27 persen (Kompas, Wageindicator, 2012). Semua kenaikan upah minimum itu tentu tidak dicapai dari kebaikan pengusaha atau pemerintah semata. Aksi jalanan buruh ikut mempengaruhi proses penentuan besaran upah minimum (Juliawan, 2011: 364-366).

Selain pencapaian kenaikan UMK secara umum di berbagai daerah, aksi jalanan buruh juga berhasil mendapat konsesi lain. Aksi ribuan buruh melakukan 'grebek pabrik' di Bekasi telah sukses memaksa ratusan pabrik untuk mengangkat puluhan ribu buruh *outsourcing* dan kontrak menjadi buruh tetap. Data dari Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) menunjukkan bahwa aksi-aksi grebek yang diinisiasi FSPMI telah berhasil menuntut lima puluhan pabrik untuk mengubah status 40 ribuan buruh *outsourcing* menjadi buruh tetap (Febrianto, 2012). Jumlah ini akan bertambah besar jika ditambah dengan aksi 'grebek pabrik' yang dipelopori oleh Forum Komunikasi dan Informasi (FKI) KSPSI Bekasi. Menurut pengakuan salah satu anggota Presidium FKI, aksi grebek pabrik yang dilakukan FKI hingga November 2012, berhasil membebaskan 12 ribu buruh *outsourcing* untuk kemudian diangkat menjadi buruh tetap (Maianto, 2012). Jumlah buruh *outsourcing* yang berhasil diangkat menjadi buruh tetap masih akan bertambah jika grebek yang diinisiasi serikat di bawah bendera Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh Bekasi dihitung.

Ada beberapa hal yang patut dicatat dari berbagai aksi jalanan buruh belakangan ini. Pertama, aksi jalanan buruh dipilih secara sadar sebagai media perjuangan. Beberapa pemimpin buruh menyatakan dengan gamblang bahwa mereka sudah

habis kesabaran melihat watak negara dan pengusaha. Beberapa keberhasilan aksi jalanan juga makin mempertebal keyakinan pemimpin buruh untuk selanjutnya menggunakan aksi jalanan sebagai metode penuntutan kepentingan mereka. Kedua, aksi-aksi jalanan juga memperlihatkan munculnya aliansi-aliansi antar serikat buruh. Fragmentasi serikat-serikat buruh ternyata tidak seburuk yang dibayangkan pengamat sebelumnya. Mereka yang berkompetisi tetap menyediakan ruang untuk bekerjasama sebagai bagian dari kelompok buruh yang lebih besar (Juliawan, 2009). Ketiga, aksi jalanan buruh tidak lagi hanya membawa isu di dalam pabrik. Mereka mulai ikut menyuarakan kepentingan publik yang lebih luas. Misalnya, isu penolakan kenaikan harga BBM⁵, jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁶, penolakan terhadap RUU Organisasi Masyarakat⁷ dan RUU Keamanan Nasional⁸ di Yogyakarta, aksi buruh pada *May Day* 2013 juga menuntut pelaksanaan Reforma Agraria sejati⁹.

⁵ Setelah tahun 2012 juga turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM, buruh di tahun 2013 kembali melakukan aksi penolakan. Ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan berbagai elemen buruh lainnya mengepung gedung DPR-MPR RI. (Monitor Indonesia, 17 Juni 2013)

⁶ Ribuan buruh berunjuk-rasa berjalan dari Kementerian Kesehatan menuju Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, menuntut adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kompas, 28 September 2012).

⁷ Sebelum akhirnya disahkan pada awal Juli 2013, ribuan buruh buruh Jabodetabek yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) telah melakukan aksi demonstrasi menolak RUU Ormas di depan Gedung DPR (Republika, 2 Juli 2013).

⁸ Puluhan ribu buruh dalam payung Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak RUU Keamanan Nasional dengan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. (Tribunnews, 22 November 2012).

⁹ Ribuan buruh di Yogyakarta yang tergabung dalam Komite Aksi *May Day* memperingati Hari Buruh Internasional dengan mengajukan beberapa tuntutan, salah satunya ialah Reforma Agraria (Tribunnews, 29 April 2013).

Signifikansi Aksi-aksi Jalanan Buruh

Berbeda dengan pengamat lain yang kurang memberi perhatian pada signifikansi aksi jalanan buruh, tulisan ini berpendapat sebaliknya. Seperti yang dengan tepat dinyatakan oleh Juliawan (2011:352), *"While in many ways Indonesian labour is not yet an established political force... industrial workers have been routinely mobilised to take to the streets, mainly to challenge government policies that are perceived as threats to their well-being, but also to show support to other non-labour causes"*. Politik jalanan seperti ini memiliki signifikansi tersendiri bagi buruh, baik secara material maupun immaterial. Beberapa aksi jalanan berhasil mendesakkan kepentingan buruh dalam perundingan dengan negara dan kapital (misal dalam penentuan upah). Selanjutnya, aksi jalanan buruh juga ikut berkontribusi dalam mendobrak hubungan antara pemerintah dan pengusaha yang selama masa Soeharto secara alamiah dianggap 'mesra' demi memacu pertumbuhan ekonomi (Juliawan, 2011: 366). Pada sisi immaterial, aksi jalanan telah mendorong hadirnya pengakuan elemen masyarakat lain (pemerintah, pengusaha, kelompok lain) terhadap adanya *'collective power'* buruh. Aksi buruh juga dianggap ikut berkontribusi dalam merebut kembali 'jalanan' yang selama masa Soeharto dikonstruksi sebagai medan 'disiplin' dan 'menakutkan'. Aksi jalanan buruh pasca Soeharto ikut kembali membangkitkan lagi 'jalanan' sebagai area aksi politik populis, sebagaimana pada masa Soekarno. Selebihnya, menurut Juliawan (2011: 364), aksi protes dan kritik buruh ikut menawarkan kepada masyarakat cara pandang baru untuk memikirkan ulang berbagai konsepsi tentang 'masyarakat', 'negara' atau 'politik' yang selama ini diterima begitu saja. Contoh dari hal ini misalnya ialah pandangan umum tentang pentingnya penciptaan 'iklim investasi' bagi penciptaan kemakmuran masyarakat.

Pandangan yang hampir diterima sebagai *taken for granted* ini mendapat peluang untuk ditentang melalui berbagai aksi protes buruh. Bukannya mensejahterakan, memanjakan 'iklim investasi' sama saja dengan mengikat leher buruh dengan upah murah.

Selain dampak material, aksi jalanan buruh juga berkontribusi pada proses pembentukan identitas buruh (internal) itu sendiri. Pemahaman tentang proses pembentukan identitas buruh lewat berbagai aksi jalannya merupakan hal penting untuk dijelaskan. Tanpa pemahaman terhadap pembentukan identitas buruh dalam keterlibatan mereka pada berbagai aksi jalanan, kita akan gagal untuk menjelaskan *"..the internal dynamics of the working class, under what circumstances workers' become involved in collective action, or how they have given meaning to such involvement"* (Saptari, 2008: 9). Saptari (2008) dengan mengajukan kasus mogok buruh PT Mayora berargumen bahwa pembentukan identitas pekerja sebagai kelas ditentukan oleh dua faktor sekaligus, yaitu kondisi kerja (material-objektif) dan pengalaman buruh baik di tempat kerja maupun di lingkungan mereka tinggal (immaterial-subjektif). Pengalaman buruh dengan demikian tidak terbatas pada aksi bersama politik seperti mogok atau demonstrasi. Memang benar bahwa *"The various modes of protest, the rhetoric used, and the theatrics involved helped workers obtain in new experiences the consciousness of being part of a larger group"* (Saptari, 2008: 34-35). Namun pengalaman juga menyangkut kehidupan buruh sehari-hari di dalam komunitas mereka. Kondisi kerja tetap menjadi dasar, sementara 'pengalaman' menjadi perantara dalam proses pembentukan identitas kelas pekerja. Studi Saptari (2008) dapat dilihat telah memberikan kontribusi besar pada kajian perburuhan Indonesia, khususnya terkait isu aksi jalanan dan pembentukan identitas buruh.

Dalam kasus yang lebih spesifik, aksi-aksi jalanan buruh di Bekasi dan kegiatan kolektif lain yang menyertainya, telah turut melahirkan benih-benih pembentukan kelas buruh (Habibi, 2013). Perjuangan politik buruh Bekasi melalui 'grebek pabrik' yang tidak lagi mengenal sekat warna bendera, kegiatan pendidikan bersama, ruang-ruang kultural yang diisi praktik keseharian buruh, dan produksi simbol kolektif telah menyediakan sebuah pengalaman kelas yang mampu membangun kesadaran kolektif sebagai buruh. Pengalaman kelas demikian turut membangun perasaan senasib sepenanggungan yang kuat di antara buruh. Ia juga berkontribusi membentuk kesadaran dimana kepentingan buruh nyaris selalu berbeda dan bertentangan dengan mereka para pemilik kapital. Pengalaman kelas itu juga telah memberi mereka simbol-simbol kolektif yang makin memperkuat identitas bersamanya sebagai buruh. Aksi jalanan buruh dan pengalaman kelas yang tercipta darinya, disadari atau tidak telah mengubah cara pandang (kesadaran) buruh terhadap diri dan lingkungan sosialnya. Para buruh mulai mampu melihat dengan lebih jelas kesamaan nasib dan kepentingan diantara mereka, yang berlawanan dengan nasib dan kepentingan pemilik kapital di pihak lain. Pembentukan kelas buruh tengah berlangsung. Pandangan kritis buruh terhadap Hubungan Industrial Pancasila yang bercorak anti-konflik telah mulai muncul. Buruh kini mulai menganggap bahwa pertentangan atau konflik buruh dengan kapital bukanlah hal aneh dan tabu, tapi justru sebagai sesuatu yang wajar. Memang tidak semua buruh mempunyai pengalaman kelas yang dapat membangun kesadaran kolektif mereka. Meski sama-sama bekerja di dalam pabrik sebagai buruh, tidak otomatis membuat mereka semua memiliki kesadaran kelas. Mereka yang tidak secara aktif terlibat langsung

dalam masifnya aksi jalanan, pendidikan, kegiatan kultural bersama maupun produksi simbol bagi pengikat identitas kolektif buruh, tidak memiliki bentuk pengalaman kelas tertentu yang diperlukan untuk mendorong penguatan kesadaran kelas.

Masa Depan Gerakan Buruh: Aksi Jalanan dan Partai Buruh?

Pertanyaan penting yang sering dilontarkan baik para aktivis maupun pengamat terhadap fenomena keriuhan aksi jalanan buruh belakangan ini ialah, akan berujung kemana aksi-aksi jalanan itu? Juliawan (2011) melihat bahwa aksi jalanan buruh masih akan berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Gerakan buruh disinyalir tidak akan berkembang menjadi partai politik¹⁰ atau kelompok kepentingan. Gerakan buruh Indonesia, seperti dinyatakan Juliawan (2011), tidak punya kebutuhan untuk melakukan unifikasi dan sentralisasi (sebagai karakter organisasi buruh modern), paling tidak dalam waktu dekat. Mereka masih akan mengandalkan aksi jalanan dan juga memanfaatkan perundingan-perundingan dalam mekanisme yang tersedia (*tripartite*) sebagai arena perjuangannya terhadap negara dan kapital. *"Labour movements will continue to consist*

¹⁰ Tentu saja di Indonesia sebelumnya telah berdiri partai berbasis buruh, seperti Partai Buruh Nasional dengan pimpinan Mukhtar Pakpahan yang ikut Pemilu 1999. Kemudian berganti nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat pada Pemilu 2004 (Ford, 2005: 201) dan kembali mengubah nama menjadi Partai Buruh pada Pemilu 2009 (Pemilu Indonesia, 2013). Tetapi yang dimaksud Juliawan barangkali ialah Partai Buruh yang dibentuk oleh serikat-serikat buruh dengan jumlah anggota besar yang turut menggerakkan aksi jalanan belakangan ini. Terutama mereka yang tergabung dalam MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) yaitu: KSPSI, KSPI, KSBSI dengan total anggota sekitar 2 juta orang. Dengan kata lain, sebuah partai buruh yang menyatukan berbagai basis buruh di berbagai serikat yang ada. Mengenai kiprah partai berbasis buruh pasca Soeharto dalam Pemilu, lihat lebih detail dalam Ford (2005).

of loose and decentralised networks of activists and unions without strong central leadership, even if the unions are part of a unitary organisation or affiliated with bigger organisations based in Jakarta” (Juliawan, 2011: 368).

Juliawan menunjukkan bahwa aksi jalanan akan tetap dipilih buruh karena dianggap masih memberikan hasil cukup memuaskan. Selain secara material terbukti cukup efektif, aksi jalanan buruh juga seakan mendapat angin segar dari negara. Pasca Soeharto, muncul kecenderungan bahwa berbagai aksi kolektif-jalanan buruh mulai diterima sebagai cara berhubungan dengan negara yang sah. Terjadi semacam proses ‘pelebagaan protes’ dari negara. Protes jalanan kemudian dianggap sebagai mekanisme yang wajar dan sah dalam berhubungan dengan negara. Tidak hanya terhadap aksi buruh, berbagai aksi dari berbagai kelompok kepentingan lain serasa dibiarkan oleh negara dengan hanya sedikit pembatasan. Perkembangan ini sekaligus memiliki implikasi lain. Adanya ‘pelebagaan protes’, munculah kecenderungan di kalangan buruh untuk terus melanjutkan aksi jalanan selama ini yang dianggap berhasil.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Lane (2012). Ia termasuk orang yang percaya bahwa gerakan buruh belakangan ini akan berujung pada pembentukan partai buruh. Lane menyebut beberapa indikasi akan hal ini.

“Dalam tiga tahun terakhir ini, dengan berkembangnya gerakan serikat buruh sektor formal yang melahirkan MBPI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) dan yang mampu melakukan mogok nasional, situasi sudah berubah. Ini dirasakan oleh semua orang, termasuk serikat buruh kecil yang berhaluan ideologis terbuka dan lebih kiri. Saya kira dinamika yang sedang berkembang ini, asal tidak direpresi atau dikhianati, sedang menciptakan situasi untuk melahirkan sebuah gerakan politik

rakyat buruh ataupun sebuah partai buruh. Saya tidak bisa ramalkan mekanismenya. Apalagi diluncurkan oleh semua atau sebagian serikat buruh melalui pengurusnya atau strukturnya? Atau melalui mekanisme di luar itu? Atau kombinasi? Atau melalui perpecahan ataupun gabungan?”.

Pandangan Lane didasarkan pada sebuah pengamatan bahwa embrio bagi partai buruh telah hadir dalam diri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang juga berperan sebagai salah satu pilar utama MPBI (Lane, 2013). Embrio ini dapat dilihat dari formasi pra-partai yang dibangun FSPMI¹¹. Wacana yang sering digulirkan FSPMI tentang perlunya sebuah partai buruh mandiri dinilai sebagai fase pendahulu krusial sebelum berlanjut dalam realisasi pembentukan partai buruh. Lane (2013) juga tidak ketinggalan untuk menyebut intervensi serikat buruh terhadap Pemiluakda sebagai langkah awal penting bagi lahirnya partai buruh. Rieke Diah Pitaloka sebagai calon Gubernur Jawa Barat 2013-2018, memang dikenal sangat dekat dengan serikat buruh, terutama FSPMI. Bukan hal yang aneh, meskipun tidak secara terbuka mendukung ‘Oneng’, banyak sekali anggota dan pengurus FSPMI yang menjadi relawan PITAMAS (Rieke Diah Pitaloka-

¹¹ Mungkin salah satu yang dirujuk Lane terkait kemampuan FSPMI mengorganisasi iuran anggota. Pada tahun 1999 ketika jumlah anggotanya 60 ribu buruh, FSPMI berhasil mengumpulkan iuran sekitar 60 juta per tahun. Di tahun 2012, jumlah anggotanya meningkat menjadi 170 ribu buruh dengan iuran yang berhasil dikumpulkan naik drastis menjadi sejumlah 10 milyar per tahun (Kompas, 3/12/2012). Secara umum, FSPMI mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar 2 persen dari upah minimum yang diterima. Selain itu, anggota juga masih harus membayar iuran yang sering disebut “Dana Perjuangan” untuk kepentingan aksi masa, yang besarnya iuran yang berhasil dikumpulkan serikat buruh dilihat telah menjadi tonggak penting bagi kemandirian gerakan buruh, sebuah prasyarat penting bagi lahirnya partai buruh independen.

Teten Masduki) dalam upaya pemenangan Pemilu Jawa Barat. Meski faktor Jokowi selalu dianggap sebagai pendongkrak terpenting perolehan suara PITAMAS, namun banyak pengamat dan aktivis melihat peran relawan buruh dalam memenangkan suara PITAMAS, terutama di kawasan-kawasan industri sebagai hal yang tidak bisa diremehkan.

Embrio partai buruh dalam diri serikat buruh, terutama FSPMI memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Soliditas pengumpulan iuran anggota, eksperimen terlibat langsung dalam pertarungan Pemilu, dan pendidikan kaderisasi¹² yang dijalankan FSPMI mungkin menjadi secercah harapan bagi terbentuknya partai buruh. Hanya saja, kita mesti segera ingat bahwa FSPMI bukanlah pemain terbesar dalam konstelasi serikat buruh pasca Soeharto. Dalam tubuh MPBI, sumbangan anggota terbesar masih disetor oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan anggota sekitar 1,6 juta orang. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dimana FSPMI terafiliasi didalamnya, menyumbang 793 ribu buruh. Konfederasi ketiga yang berkontribusi dalam MPBI ialah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dengan anggota 227 ribu orang (Kemenakertrans, 2010). Dari data ini saja terlihat betapa FSPMI dengan anggota 170 ribu masih menjadi minoritas dalam tubuh KSPI. Angkanya menjadi kian kecil jika ditempatkan dalam konstelasi di tubuh MPBI. MPBI memang wadah bersama buruh nir ikatan ideologi yang kuat.

¹² FSPMI melakukan pendidikan berjenjang dari tingkat dasar hingga lanjutan. Di samping itu, terutama di Bekasi, FSPMI memiliki titik kumpul pendidikan yang sekaligus menjadi arena budaya bagi anggotanya, seperti Saung Buruh dan Omah Buruh. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam keluasan partisipasi anggota, pendidikan di FSPMI tetap dianggap jauh lebih baik dan progresif oleh kalangan serikat buruh lain, misalnya SPSI (Wawancara dengan Sa, salah satu pengurus SPSI Cabang Bekasi, 8 Januari 2013).

Spektrum berbagai warna ideologi, meskipun tidak secara eksplisit terlihat, sangat terasa dalam tubuh MPBI. Mayoritas anggota MPBI tetap didominasi serikat warisan Soeharto (SPSI) yang meskipun beberapa anggota mudanya mulai punya semangat progresif, namun secara umum tetaplah serikat buruh konservatif.

Dominasi jumlah anggota SPSI dalam MPBI tentu tidak ingin mengatakan bahwa serikat warisan Soeharto itu dapat dengan mudah mengendalikan anggota federasi atau konfederasi lain di dalamnya, terutama FSPMI. Sudah dikenal luas di kalangan buruh betapa FSPMI merupakan tulang punggung bagi aksi-aksi jalanan yang digelar MPBI. FSPMI memiliki kekuatan penggerak massa yang jauh lebih efektif dibanding serikat buruh lain di MPBI. Tidak berlebihan jika FSPMI dimana ketua umumnya, Said Iqbal yang sekaligus juga menjadi Ketua KSPI, memainkan peran penting dalam gerak MPBI. Meski demikian, jumlah anggota FSPMI sebagai sebuah embrio partai buruh, nampak masih kurang signifikan dalam skala nasional, sebuah prasyarat penting bagi pembentukan partai yang besar.

Dalam konteks seperti ini, apa yang diperkirakan Juliawan (2011) patut diperhatikan. Pembentukan partai akan tergantung pada seberapa kuat tuntutan kebutuhan masa-buruh dalam skala nasional terhadap hadirnya sebuah partai buruh mandiri. Semakin banyak buruh yang membutuhkan kehadiran sebuah partai, kemungkinan pembentukan sebuah partai buruh independen akan lebih besar dapat dilakukan. Aksi-aksi jalanan belakangan memang masih dirasa efektif sebagai senjata buruh melakukan tuntutan. Dalam kondisi demikian, kebutuhan akan sebuah partai nampak belum terasa. Aksi jalanan masih akan terus dilakukan buruh sepanjang dinilai masih menguntungkan secara praktis. Tapi di sisi lain, buruh,

terutama dalam serikat non-FSPMI masih akan berjalan seperti biasa: *business as usual*. Iuran anggota tetap dipatok rendah dengan kedisiplinan yang rendah pula, pendidikan dan kaderisasi tidak dijalankan, dan membayangkan serikat seperti SPSI terlibat kegiatan politik dalam pertarungan Pemilu, sebagaimana dilakukan pengurus dan anggota FSPMI, mungkin masih menjadi bayangan yang agak jauh.

Tapi tentu saja gambaran seperti itu mengasumsikan aksi-aksi jalanan masih akan dapat dilakukan dan memberi hasil efektif di masa depan. Bagaimana pun, kapitalisme bukanlah sistem yang statis. Gerak dialektis antar bagian sistem merupakan watak alamiah kapitalisme. Aksi dari satu bagian sistem (buruh) akan mendatangkan reaksi dari bagian sistem yang lain (pemilik kapital). Sama sekali tidak ada jaminan bahwa negara akan terus memelihara 'pelembagaan protes'. Mengapa negara akan terus membiarkan aksi jalanan buruh dan menganggap aksi itu sebagai mekanisme yang sah dalam berhubungan dengan negara? Bagaimana jika ada kondisi objektif tertentu (tekanan keuntungan-krisis ekonomi) yang akhirnya 'memaksa' negara-kapital untuk menindak aksi-aksi buruh? Kepentingan negara mengkondisikan sekaligus dikondisikan oleh perjuangan kelas yang terjadi di masyarakat.

Serangan balik kapital-negara telah terbukti di Bekasi. Ketika kepentingan salah satu kapital terbesar di Bekasi terancam, yaitu PT SEIN (Samsung Indonesia)¹³, serangan balik terhadap aksi jalanan buruh dimulai. Sejak pagi: 29 Oktober 2012, empat ratusan preman di sekeliling PT SEIN dengan bersenjata bambu runcing,

kayu, dan pentungan membubarkan aksi demonstrasi buruh yang menuntut penghapusan *outsourcing* di tiga perusahaan di dekat PT SEIN (Kompas, 31/10/2012). Seakan belum puas, sore harinya preman menghancurkan Saung Buruh, sebuah rumah panggung di sekitar Jababeka yang dijadikan ruang kumpul bersama buruh FSPMI untuk kegiatan konsolidasi dan pendidikan. Buruh yang sedang berada disitu dipukuli¹⁴. Pasca aksi brutal itu, buruh akhirnya dipaksa menyetujui kesepakatan pakta damai: 8 November 2012. Aksi jalanan 'grebek pabrik' disepakati tidak akan lagi dijalankan demi menjaga 'hubungan industrial yang kondusif'. Pakta damai telah mengubah peta perjuangan buruh.¹⁵ Aksi-aksi 'grebek pabrik' di seputaran kawasan industri mulai menurun drastis. Beberapa grebek memang masih terjadi di luar kawasan, namun tidak dengan intensitas beberapa bulan sebelumnya.¹⁶

Dalam level nasional, kaum buruh melihat bahwa dua Rancangan Undang-Undang: RUU Keamanan Nasional dan

¹⁴ Wawancara dengan Ar, anggota FSPMI pengelola Saung Buruh, 11 Januari 2013.

¹⁵ Setelah pakta damai, aksi jalanan buruh hanya diperbolehkan berlangsung hingga pukul 18.00 dan dianggap sebagai aksi demonstrasi biasa. Aksi di atas pukul 18.00 hanya boleh dilakukan di dalam lingkungan pabrik dan dianggap sebagai mogok kerja. Ini berarti, masa buruh dari pabrik lain tidak dapat memberikan solidaritas ke pabrik lain di atas pukul 18.00. Aksi solidaritas antar pabrik yang biasanya dapat berlangsung dengan menginap selama beberapa hari menjadi tidak bisa lagi dilakukan.

¹⁶ Menurunnya aksi jalanan tidak lain juga karena masih masifnya aksi premanisme di seputaran Bekasi pada tahun 2013. Di kawasan industri MM2100, organisasi masyarakat mengatnamakan Masyarakat Peduli Investor (MPI), membangun tenda di tanah lapang, layaknya angkatan perang yang siap tempur. Mereka seakan melakukan konsolidasi untuk mengintimidasi buruh. Puluhan spanduk dipasang di titik-titik strategis, bertuliskan 'Masyarakat Peduli Investor: Sahabat Pengusaha Musuh Buruh Anarkis'. Bahkan, menjelang 6 Februari, mereka sudah mengancam akan melakukan *sweeping* terhadap buruh yang mengenakan baju atau jaket serikat

¹³ PT Samsung merupakan perusahaan multinasional asal Korea Selatan yang berani secara terbuka menolak berdirinya serikat buruh di pabrik-pabriknya di seluruh dunia. Bukan hal aneh jika PT Samsung dikenal paling sering dikecam karena telah melakukan pemberangusan serikat buruh (*Union Busting*).

RUU Organisasi Masyarakat secara tidak langsung merupakan upaya kolaborasi negara – kapital dalam memukul mundur buruh yang telah begitu merepotkan dengan aksi-aksi jalannya (Republika, 2 Juli 2013; Tribunnews, 22 November 2012; Gatra, 4 Juli 2013). Pada awal Juli 2013, RUU Organisasi Masyarakat akhirnya disahkan DPR. Buruh melalui Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras pengesahan RUU Organisasi Masyarakat dengan menyebut demokrasi akan kembali ke jaman Orde Baru. Mereka pun mengancam akan melakukan tiga mogok nasional dalam tahun ini (Gatra, 4 Juli 2013).

Situasi demikian melahirkan kembali kebutuhan akan persatuan buruh dalam skala lebih besar. Serangan balik terhadap buruh membuka mata betapa kapital-negara menggunakan instrumen otoritas formal negara untuk menundukkan aksi jalanan buruh. Berlindung di balik jubah aparat formal, kapital-negara dapat memaksa buruh menyetujui pakta damai. Sebuah aturan legal juga tengah disiapkan untuk meredam buruh. Tidak dapat disangkal, kekuasaan formal memainkan peran penting dalam sebuah perjuangan. Aksi-aksi jalanan buruh tidak bisa dilakukan terus-menerus tanpa diikuti perebutan instalasi-instalasi kekuasaan formal. Meskipun kondisi ekonomi yang tengah tumbuh meningkatkan posisi tawar buruh, tanpa dibarengi kekuatan politik yang kokoh, buruh akan tunduk di bawah pengaturan negara yang mengakomodasi kepentingan kapital. Kondisi ekonomi yang kondusif dan serangan balik kapital mendorong kebutuhan persatuan buruh

yang lebih besar. Elemen progresif serikat buruh dapat menggunakan momentum ekonomi-politik ini bagi perluasan basis dukungan pembentukan partai buruh. Masa depan pembentukan partai buruh akan sangat tergantung pada seberapa jauh upaya elemen serikat buruh progresif dalam memanfaatkan di satu sisi suatu kondisi ekonomi yang tengah tumbuh, dan pada saat bersamaan secara politis mampu menggunakan langkah perlawanan balik kapital-negara sebagai isu lawan bersama untuk menumbuhkan kebutuhan akan kehadiran sebuah partai buruh independen.

Penutup

Gerakan buruh pasca Soeharto memang tidak selemah yang digambarkan para pengamat sebelumnya. Di tengah himpitan pasar kerja fleksibel, buruh masih gencar melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi jalanan. Melalui aksi jalanan, buruh memperoleh manfaat material yang dinilai memadai. Kenaikan upah minimum dan perubahan status kerja yang lebih menguntungkan, merupakan beberapa kompensasi yang diperoleh buruh lewat aksi jalanan mereka. Di samping perolehan material, aksi jalanan juga berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif buruh. Di Bekasi, pembentukan kelas buruh tengah berlangsung bersamaan dengan masifnya aksi jalanan buruh. Tingginya intensitas aksi jalanan menimbulkan reaksi dari pemilik capital. Serangan balik terhadap buruh dimulai. Menggunakan tameng preman bayaran dan aparat formal, kapital memukul aksi jalanan buruh.

Pertanyaan penting lantas muncul di permukaan. Bagaimana masa depan aksi jalanan buruh? Akankah aksi buruh belakangan akan berujung pada pembentukan partai politik? Seperti telah dibahas sebelumnya, pembentukan partai akan tergantung pada seberapa kuat

tertentu, khususnya FSPMI yang merayakan hari jadinya. Kejadian yang dikhawatirkan akhirnya benar-benar terjadi. Pada saat buruh anggota FSPMI ingin merayakan ulang tahun mereka, banyak diantaranya yang melalui kawasan MM2100 dihentikan, dipukuli, dilucuti jaketnya dan kemudian dibakar (Wawancara dengan Wa, anggota FSPMI, 9 Februari 2013).

kebutuhan buruh terhadap lembaga kepentingan modern itu. Aksi jalanan memang awalnya nampak akan terus dapat dilakukan dan memberi hasil efektif bagi buruh. Jika kecenderungan ini terus terjadi, bisa jadi benar tidak ada kebutuhan buruh untuk membangun partai. Hanya saja, serangan balik kapital-negara telah membuktikan bahwa aksi jalanan tidak bisa terus dilakukan tanpa upaya perebutan kekuasaan formal oleh buruh. Pada sisi lain, embrio partai buruh dalam diri FSPMI memang tidak bisa disepelekan. Tetapi jumlah anggota serikat buruh sempalan SPSI itu masih kurang signifikan secara nasional.

Dalam kondisi demikian, pembentukan partai buruh sebenarnya memiliki landasan ekonomi-politik yang cukup kuat. Suatu kondisi ekonomi yang tengah tumbuh dan serangan balik kapital-negara terhadap aksi jalanan buruh dapat menjadi momentum bagi lahirnya kebutuhan akan sebuah organisasi kepentingan modern bagi buruh: sebuah partai independen. Pada akhirnya, masa depan pembentukan partai akan tergantung pada seberapa jauh upaya elemen serikat buruh progresif mampu memanfaatkan di satu sisi suatu kondisi ekonomi yang tengah tumbuh, dan pada saat bersamaan secara politis mampu menggunakan langkah perlawanan balik kapital-negara untuk menumbuhkan kebutuhan akan kehadiran sebuah partai buruh independen. Elemen progresif buruh tentu tidak bisa sendirian. Tantangan itu kini ada di hadapan kita: ikut berkontribusi membantu elemen progresif itu atau justru sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Atkinson, J. (1984). *Flexibility, Uncertainty and Manpower Management*. IMS Report No.89, Institute of Manpower Studies, Brighton.
- Caraway, T. (2006). Freedom of Association: Battering Ram or Trojan Horse? (.) *Review of International Political Economy*. Vol. 13 No. 2, pp 210-32.
- Febrianto, R. (2012, 14 November), *HOSTUM Jalan Menuju Buruh Indonesia Bermartabat*, Makalah pada Diskusi Pejaten: Kerja Kontrak-Outsourcing dan Perlindungan Hak Pekerja, Jakarta.
- Ford, M. (2005, 9-11 February.). *Economic Unionism and Labour's Poor Performance in Indonesia's 1999 and 2004 Elections*. Paper presented at the Association of Industrial Relations Academics of Australia and New Zealand Conference: Reworking Work, Sydney, Australia.
- Habibi, M. (2013). Politik Jalanan dan Pembentukan Kelas Buruh. *Majalah BASIS*, Vol. 62 No. 05-06.
- Hadiz, V.R. (1996). Buruh Dalam Penataan Politik Awal Orde Baru. *Majalah Prisma* No.7, Juli.
- _____. (1998). Reformasi Total? Labour After Soeharto. *Indonesia*, No.66, pp 109 - 125.
- _____. (2002). The Indonesian Labour Movement: Resurgent or Constrained?. *Southeast Asian Affairs*, pp 130-142.
- Islam, I. (2000). *Employment, Labor Market and Economic Recovery In Indonesia: Issues and Options*. Working Paper 00/04 Jakarta: UNSFIR.
- Juliawan, B.H. (2009). Menakar Ulang Fragmentasi Kelas Buruh. *Majalah BASIS*, Vol. 58 No. 09-10.

- _____. (2010a). Extracting Labor from Its Owner: Private Employment Agencies and Labor Market Flexibility in Indonesia. *Critical Asian Studies*. Vol. 42 No. 1, pp 25-52.
- _____. (2010b). *Playing Politics: Labour Movements in Post-Authoritarian Indonesia*. Disertasi Phd tidak diterbitkan, Oxford University.
- _____. (2011). Street-level Politics: Labour Protests in Post-authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*. Vol. 41 No. 3, pp 349-370.
- Katjasungkana, N. (1996). Undang-Undang Perburuhan Masa Orde Baru. *Majalah BASIS* No. 7-8, Oktober.
- Lane, M. (2013a). *Dr. Max Lane: Sistem yang Berlaku ini Tidak Waras*. Wawancara *Jurnal Indoprogres* Edisi IX, <http://indoprogres.com/lbr/?p=1194> (diakses 30 April 2013).
- _____. (2013b, 5 April). *Decentralization and Its Discontents*. Makalah Presentasi Seminar di Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
- Maianto, T. (2012). *Membangun SPSP Yang Modern, Progresif & Revolusioner*. <http://rumahburuh.com/membangun-spspi-yang-modern-progresif-revolusioner.html> (diakses 7 Januari 2013).
- Mufakhir, A. (2012). *Hukum yang Retak, Perundingan, dan Grebek Pabrik: Catatan Awal Pergerakan Buruh di Bekasi*. http://www.majalahsedane.net/2012/10/hukum-yang-retak-perundingan-dan-grebek_5175.html#more (diakses 6 Desember 2012).
- Pemilu Indonesia. (2013). *Partai Buruh*. <http://www.pemiluindonesia.com/parpol/partai-buruh.html> (diakses 10 Juli 2013).
- Purdy, D. (1988). *Sosial Power and The Labour Market : A Radical Approach to Labour Economics*. Macmillan Education Ltd : London.
- Rudiono, D. (1992). Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak. *Majalah Prisma* No.1, Januari.
- Saptari, R. (2008). The Politics of Workers' Contention: The 1999 Mayora Strike in Tangerang, West Java. *International Review of Social History*. Vol. 53, pp. 1-35.
- Tjandraningsih, I, Herawati, R & Suhadmadi. (2010a). *Diskriminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak Dan Outsourcing Buruh Di Sektor Industri Metal Di Indonesia*. Bandung: Akatiga-Fspmi-Fes.
- Tjandraningsih, I dan Herawati, R. (2008). Dinamika Jaringan Perburuhan Indonesia : Angin Segar Gerakan Buruh. *Jurnal Indoprogres*, Mei <http://indoprogres.com/dinamika-jaringan-perburuhan-di-indonesia/> (diakses 9 Juli 2013).
- Tornquist, O. (2004). Labour and Democracy? Reflection on the Indonesian Impasse. *Journal of Contemporary Asia*. Vol. 34 No. 3, pp 377-399.
- Uwiyono, A. (2006). Refleksi Masalah Hukum Perburuhan tahun 2005 dan Tren Hukum Perburuhan tahun 2006. www.ui.ac.idhttp://www.ui.edu/indonesia/main.php?hlm=berita-&id=2006-01-02%2010:37:40 (diakses 2 Januari 2008).
- Warouw, N. (2005). Pekerja Industri Indonesia, Gerakan Buruh, dan New Social Movement: Merajut Sebuah Kemungkinan. *Jurnal Analisis Sosial*. Vol. 10 No 2, hal 1-18.

Surat Kabar

Gatra, 3 Oktober 2012, Mogok Nasional, Buruh Kepung Jakarta

Gatra, 5 Oktober 2012, Buruh Ancam Mogok Sepekan

Gatra, 4 Juli 2013, Buruh Tuding Pengusaha Jadi Bandar UU Ormas

Kompas, 28 September 2012, Buruh Tuntut Jaminan Sosial dan Upah Murah

Kompas, 3 Oktober 2012, Kawasan Industri Dilumpuhkan

Kompas, 3 Oktober 2012, MPBI: Konsentrasi Demo Buruh Bukan di Jakarta

Kompas, 31 Oktober 2012, Buruh Kecam Penyerangan

Kompas, 3 Desember 2012, Gerakan Buruh Kian Mandiri

Monitor Indonesia, 17 Juni 2013, Tolak BBM Naik, Ribuan Buruh Kepung Gedung DPR

Republika, 2 Juli 2013, Ribuan Buruh Demo Tolak RUU Ormas

Tribunnews, 22 November 2012, Ini Alasan Majelis Pekerja Buruh Tolak RUU Kamnas

Tribunnews, 29 April 2013, Ribuan Buruh Yogya Geruduk Malioboro Peringati Mayday



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia

.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281